

dilaksanakan semata-mata hanya untuk memenuhi penyerapan dari anggaran yang sudah dialokasikan pada instansi pemerintah pada periode tertentu, sehingga masih ditemui program dan kegiatan yang hanya menghasilkan beberapa keluaran (*output*) namun keluaran (*output*) tersebut tidak berkaitan dengan pencapaian hasil kinerja program (*outcome*). Tujuan dari penerapan SAKIP ini agar hasil (*outcome*) dari pelaksanaan suatu kegiatan yang merupakan wujud dari program pemerintah memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, rencana strategis (*renstra*) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menjawab setiap tuntutan baik dari lingkungan strategis lokal, nasional maupun global, dan menjaga agar pelaksanaan atas rencana strategis tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya *renstra* yang jelas, diharapkan *renstra* dapat mendukung visi, misi, dan peluang serta memitigasi kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terdapat faktor-faktor yang menentukan mengenai efektivitas, yang pertama menurut Penelitian Yang dan Hsieh (2007) yang berjudul "*Perspective of Performance and Accountability in Public Administration, Managerial Effectiveness of Government Performance: Testing a Middle-Range Model*," dan penelitian dari Ugboro (2006) yang berjudul "*Effective Strategic Planning in Public Transit System*," yang menyimpulkan bahwa rencana strategis tidak hanya kata-kata belaka namun perlu dikonsolidasikan ke seluruh rencana sistem dan harus mengarah pada pencapaian kinerja, untuk merealisasikan semuanya maka diperlukan dukungan dari manajemen puncak dan seluruh pegawai dengan memahami prosedur yang terdapat dalam rencana startegis. Terdapat faktor-faktor yang menentukan mengenai efektivitas yang diadopsi dari pendekatan

*middle range model* Yang and Hsieh (2007), yaitu: dukungan politik, partisipasi *stakeholder*, dukungan organisasi, dan pelatihan. Dalam penelitian Nusantoro dan Subiyantoro (2009) disebutkan bahwa efektivitas penerapan SAKIP dipengaruhi oleh pedoman LAKIP, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan pemerintah pusat. Hal ini menjadi dasar pengajuan rumusan masalah, penyusunan hipotesis, dan rancangan instrumen pada kuesioner dalam penelitian ini.

Berdasarkan model tersebut dan disesuaikan dengan komponen-komponen yang berada dalam LAKIP, maka penelitian ini menggunakan faktor-faktor penentu yang memiliki kontribusi pada efektivitas penerapan SAKIP, yaitu: 1) komitmen satuan kerja, 2) dukungan dari pemerintah pusat, 3) pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP, dan 4) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Keempat faktor penentu tersebut akan menilai apakah SAKIP akan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dan dilaporkan dalam laporan kinerja berupa LAKIP. LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP.

SAKIP merupakan salah satu sistem yang dibuat pemerintah untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Penerapan SAKIP yang efektif, menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan *good governance* berjalan dengan baik. *Good governance* ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada sembilan karakteristik *good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Dalam Acuan Umum Penerapan *good governance* pada Sektor Publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2005)

akuntabilitas termasuk dari tujuh asas penerapan *good governance*. Penekanan utama dari akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan oleh organisasi sektor publik lakukan (Mahmudi, 2005: 9). Bila dikaitkan dengan kinerja pemerintah, menurut Mahsun (2006:25) kinerja memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang berada dalam rencana strategis.

Penelitian ini dimotivasi dari berita CPNS dan Aparat pemerintah (9/12/2014), mengenai 500 kabupaten/ kota di Indonesia yang menyerahkan LAKIP pada tahun 2013, nilai tertinggi yang diraih hanya 11 kabupaten/ kota dengan peringkat B (Baik). Pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan peringkat B (Baik) dengan skor 65-75 adalah Kabupaten Bintan, Karimun, Kota Tanjungpinang, Muara Enim, Kota Sukabumi, Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Sleman, Kota Manado, dan Bandung (Indonesian Companies News, 09/12/2014).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Evaluasi LAKIP**  
**(yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan Inspektorat Provinsi)**

Peringkat Nilai	Keterangan Nilai	Skor Nilai	Jumlah Kabupaten/ Kota
AA	Memuaskan	85-100	-
A	Sangat Baik	75-85	-
B	Baik	65-75	11
CC	Cukup	50-65	170
C	Kurang	30-50	241
D	Sangat Kurang	0-30	38

(Sumber: Indonesian Companies News, 09/12/2014).

Mulai 2015, penilaian LAKIP akan menjadi dasar penentuan besaran anggaran yang akan dialokasi khusus kabupaten/ kota (Indonesian Companies News,

09/12/2014). Berdasarkan penilaian laporan evaluasi kinerja tahun 2015 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar di Indonesia dengan predikat B (Baik) (Sumber: Berita terkini Kementerian PAN dan RB, 15/12/2015).

Penelitian ini juga dimotivasi oleh adanya hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Nusantoro dan Subiyantoro (2009) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan efektivitas penerapan SAKIP berupa pedoman LAKIP, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAKIP. Selain itu penelitian Acintya dan Putri (2015) serta Utomo (2015), terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dari aparatur instansi pemerintah terhadap konsep SAKIP, dan minimnya sumber daya aparatur yang membidangi AKIP di SKPD sehingga belum berjalan dengan baik. Dari hasil berita dan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana efektivitas SAKIP sebagai sistem yang berperan dalam penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden yang berlaku.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Nusantoro dan Subiyantoro (2009) di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengetahui efektivitas penerapan SAKIP. Perbedaan dengan Nusantoro dan Subiyantoro (2009) terletak pada (1) objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau, (2) terdapat perbedaan waktu yang pada periode tersebut terjadi perubahan peraturan, semenjak diberlakukan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP tidak

diberlakukan lagi. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, unit organisasi setingkat eselon II atau Satuan Kerja/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya hanya mempertanggungjawabkan hasil (*outcome*) dari program kegiatan, dan (3) Penambahan variabel independen pada penelitian ini berupa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, karena hal terpenting dalam pelaksanaan SAKIP adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai evaluator (Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP:5). Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia akan sangat memengaruhi efektivitas SAKIP, maka sumber daya manusia yang diukur dalam penelitian ini mencakup kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menentukan terhadap efektivitas penerapan SAKIP. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau atau yang disingkat dengan Satker Randal, Satker Randal merupakan Satker yang bertugas sebagai koordinator satker dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pekerjaan Umum mewakili lingkungan yang mayoritas masalah kerekayasaan sangat mudah untuk disusun dalam perencanaan kinerja secara terukur (Dyson dan Foster, 1982; Ugboro, 2006; dan Tapinos, Dyson dan Meadows, 2005 dalam Nusantoro dan Subiyantoro, 2009).

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen satuan kerja berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?

2. Apakah dukungan pemerintah pusat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?
3. Apakah pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?
4. Apakah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SAKIP?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh komitmen satuan kerja terhadap efektivitas penerapan SAKIP.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh dukungan pemerintah pusat terhadap efektivitas penerapan SAKIP.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap efektivitas penerapan SAKIP.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terhadap efektivitas penerapan SAKIP.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengujian beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan penerapan SAKIP berjalan dengan efektif dengan memahami teori institusional yang

merupakan proses perubahan dan keberlanjutan suatu organisasi sektor publik agar terciptanya *good governance*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai sektor publik terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada instansi pemerintah dalam rangka untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk pegawai dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dimana sistem dibuat untuk memudahkan pekerjaan, sehingga bisa dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran rencana pembahas pada penelitian ini akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan secara garis besar tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian, dan membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

**BAB III : Rerangka Konseptual dan Hipotesis**

Pada bab ini berisi tentang rerangka konsep penelitian, dan hipotesis.

**BAB IV : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB V : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil analisis data dan dihubungkan dengan hasil temuan penelitian terdahulu.

**BAB VI : Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian berkaitan dengan efektivitas penerapan SAKIP untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam penyusunan laporan kinerja berupa LAKIP. Keterbatasan penelitian dan saran-saran dari hasil kesimpulan penelitian.